

Pengaruh PAD, Dana Perimbangan, dan SILPA terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Salsabila Pramestya Putri

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

putrisal65@gmail.com

Dyah Ratnawati

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur¹

dratnawati67@gmail.com

Abstrak Penerapan desentralisasi mengharuskan pemerintah daerah untuk menggali potensi daerah masing-masing. Namun, tidak semua pemerintah daerah menunjukkan kinerja yang baik. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di wilayah Gerbangkertasusila pada tahun 2018-2021. Metode kuantitatif dipilih dalam penelitian ini untuk mencapai tujuan penelitian, adapun data yang digunakan berupa data sekunder bersumber dari situs daring masing-masing daerah. Penentuan sampel yang akan digunakan dilakukan dengan metode purposive sampling sehingga diperoleh 5 (lima) Kota/Kabupaten yang memenuhi kriteria meliputi Kab. Gresik, Kota Mojokerto, Kota Surabaya, Kab. Sidoarjo, dan Kab. Lamongan. Menggunakan regresi data panel diperoleh bahwa kinerja keuangan dipengaruhi secara positif oleh Pendapatan Asli Daerah dan secara negatif oleh dana perimbangan. Sedangkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tidak memberikan pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah. Ketiga variabel secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Kata Kunci *Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran*

I. PENDAHULUAN

Masa kemerdekaan hingga reformasi, Pemerintah Indonesia menerapkan sistem sentralisasi atau sistem pemerintahan terpusat. Ketika era reformasi, pemerintahan dengan sistem sentralisasi menjadi kontroversi bagi beberapa pihak karena dirasakan mulai berbeda jika dibandingkan dengan sebelumnya. Sumber Daya Alam di beberapa provinsi dikeruk terus menerus oleh pemerintah namun tidak mendapatkan timbal balik yang signifikan (Kuncoro, 2014: 45). Banyaknya kontra akan sistem pemerintahan ini menjadikan perubahan dari sistem sentralisasi ke sistem desentralisasi atau pemberian delegasi wewenang kepada pemerintahan daerah untuk mengeksplorasi daerah mereka (Priyono et al., 2020).

Anggaran atau dikenal dengan APBD merupakan komponen penting dalam pemerintahan daerah. Pendapatan daerah berasal dari tiga aspek diantaranya, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan. Pembiayaan daerah bersumber dari empat aspek diantaranya, sisa lebih perhitungan anggaran daerah, penerimaan pinjaman daerah, dana cadangan daerah, dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan (Indonesia, 2004b).

PAD, dana perimbangan, dan SILPA merupakan komponen tak terpisahkan dari APBD. PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Indonesia, 2004a). Dana perimbangan yang meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Menurut UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah, dana perimbangan merupakan anggaran yang dialokasikan pemerintah pusat melalui APBN guna membiayai kebutuhan daerah sebagai sokongan pelaksanaan pemerintahan yang terdesentralisasi. SILPA dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan No 147/PMK.05/2021 tentang Pengelolaan Saldo Anggaran Lebih, yaitu selisih anggaran dengan realisasi anggaran pada periode berkaitan. Sisa ini kemudian digunakan pada periode berikutnya untuk membiayai pengeluaran dan pembiayaan daerah.

Kemampuan tiap wilayah dalam mengemban dan merealisasikan otonomi daerah dapat dinilai berdasarkan rasio pengukuran kinerja keuangan yang dilihat dari Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah. Kinerja keuangan daerah memberikan gambaran kemampuan pemerintah daerah dalam pengelolaan potensi daerah terutama guna memperoleh dan mengalokasikan Pendapatan Asli Daerah (Apridiyanti, 2019). Terdapat tiga rasio yang digunakan dalam pengukuran kinerja keuangan diantaranya rasio kemandirian, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi PAD (Ayu, 2018).

Gerbangkertasusila merupakan satu diantara wilayah otonomi yang berlokasi di Provinsi Jawa Timur mencakup tujuh wilayah meliputi Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Lamongan dengan Kota Surabaya sebagai pusatnya. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota/Kabupaten di wilayah Gerbangkertasusila Periode 2018-2021 memiliki beberapa masalah keuangan daerah sebagai berikut:

Tabel 1 Data Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah diukur dengan Rasio Kemandirian Daerah

Kab/Kota	Kinerja Keuangan Rasio Kemandirian			
	2018	2019	2020	2021
Kab. Gresik	49,92%	47,51%	48,28%	51,69%
Kota Mojokerto	26,45%	28,42%	36,43%	31,36%
Kota Surabaya	167,34%	171,38%	157,38%	146,86%
Kab. Sidoarjo	67,78%	65,23%	73,81%	75,33%
Kab. Lamongan	17,55%	25,38%	21,38%	26,88%
Rata-Rata	65,81%	67,58%	67,45%	66,42%

Keterangan:

1. Tinggi 75%-100%
2. Sedang 50%-75%
3. Rendah 25%-50%
4. Rendah sekali 0%-25%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah di Wilayah Gerbangkertasusila (Data Diolah Penulis, 2022)

Berdasarkan angka rasio kemandirian dapat ditarik analisis meliputi (1) Angka kemandirian pemerintah daerah pada tiga Kabupaten/Kota se-Gerbangkertasusila masih tergolong rendah terlihat dari besarnya nominal bantuan dan pinjaman yang bersumber dari pemerintah pusat/provinsi, (2) Kapasitas empat Kabupaten/Kota se-Gerbangkertasusila masih rendah untuk menjelajahi potensi yang dimiliki daerahnya untuk meningkatkan PAD yang terlihat dari bantuan dan pinjaman lebih besar daripada PAD, dan (3) Ketimpangan ketergantungan antar Kabupaten/Kota se-Gerbangkertasusila cukup signifikan. Hal ini berpengaruh terhadap pembangunan dan pertumbuhan daerah karena daerah masih bergantung dari anggaran pemerintah pusat dibandingkan mengoptimalkan PAD yang terlihat dari besarnya nominal dana transfer.

Untuk mengatasi hal tersebut, perlu diketahui penyebab kinerja keuangan daerah masih kurang. Beberapa faktor yang memberikan dampak terhadap kinerja keuangan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan, dan SILPA. Sebelumnya, dijumpai beberapa penelitian terdahulu yang melakukan riset akan hal tersebut namun masih terdapat inkosistensi hasil penelitian diantaranya Harjito et al. (2020) dan Maulina et al. (2021) menyebutkan bahwa PAD memberikan pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah sebaliknya Machmud & Radjak (2018) menyebutkan bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah. Maulina et al (2021), menunjukkan bahwa dana perimbangan memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah sedangkan Digdowiseiso et al (2022) menunjukkan bahwa dana perimbangan memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah. Sedangkan untuk variabel SILPA masih sedikit diteliti dalam penelitian terdahulu, penelitian Djuniar & Zuraida (2018) menyebutkan bahwa SILPA memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja pemerintah daerah. Adanya permasalahan kinerja keuangan, inkosistensi hasil penelitian, serta masih jarang nya penelitian pada satu diantara variabel independen menjadikan peneliti tertarik untuk meneliti judul ini.

II. LANDASAN TEORI

A. Stewardship Theory

Teori *stewardship* melihat manajemen sebagai oknum yang berkemampuan untuk memenuhi kebutuhan *stakeholders* dengan kemampuan yang dimiliki. Teori ini dapat berfungsi sebagai mekanisme pertanggungjawaban agar organisasi dapat mencapai tujuannya (Angelina et al., 2020). Dalam teori *stewardship* terdapat dua komponen yaitu pemilik sebagai *principal* dan manajemen sebagai *steward*. Jika diterapkan dalam sektor pemerintahan, masyarakat bertindak sebagai *principal* dan pemerintah sebagai *steward*. Masyarakat memiliki keinginan yang harus dipenuhi oleh

pemerintah yaitu fasilitas pelayanan yang memadai sehingga pemerintah harus dapat mengelola dan mengamankan aset daerah (Angelina et al., 2020).

B. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja keuangan merupakan gambaran dari hasil kerja pemerintah daerah dari kebijakan yang telah ditetapkan pada periode tertentu menggunakan indikator keuangan (Nugraheni & Adi, 2020). Rasio kemandirian merupakan satu diantara ketiga rasio yang dapat digunakan untuk melakukan pengukuran terhadap kinerja keuangan pemerintah. Rasio ini digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang tingkat kemampuan daerah dalam melakukan pengelolaan kegiatan pemerintah sendiri sebagai upaya peningkatan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. (Ayu, 2018). Berikut cara menentukan angka kemandirian daerah:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Bantuan Pem. Pusat/Provinsi \& Pinjaman}}$$

Tabel 2 Tingkat Kemandirian dan Kemampuan Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (dalam %)
Rendah sekali	0%-25%
Rendah	25%-50%
Sedang	50%-75%
Tinggi	75%-100%

Sumber: Kepmendagri No.690.900.327/1996

C. Pengaruh PAD terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Untuk memperoleh pendapatan Asli daerah, pemerintah daerah harus mengeksplorasi potensi yang dimiliki oleh daerahnya (Siregar, 2020). Penelitian Harjito et al. (2020), Maulina et al. (2021), dan Digdowiseiso et al. (2022) menunjukkan bahwa PAD memberikan pengaruh signifikan secara positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang berarti peningkatan PAD akan diikuti dengan kenaikan kinerja keuangan pemerintah daerah. Jika dikaji dengan Teori *Stewardship*, upaya untuk memenuhi kebutuhan publik ditunjukkan dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh daerah dan dioptimalkan untuk kepentingan bersama. Semakin besar PAD yang dipunyai oleh pemerintah daerah, semakin besar pula kinerja keuangan pemerintah tersebut.

H1 : PAD berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

D. Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Maulina et al. (2021), dana perimbangan memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dengan kata lain semakin besar alokasi dana perimbangan akan berdampak pada peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah. Berbanding terbalik dengan hasil penelitian Digdowiseiso et al. (2022) yang menunjukkan bahwa dana perimbangan memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang berarti, semakin tinggi dana perimbangan semakin menurun pula kinerja keuangan karena dana perimbangan tidak berasal dari kemampuan pemerintah dalam merealisasikan pendapatan daerah. Jika dikaji dengan Teori *Stewardship* dana

perimbangan dikucurkan untuk membantu pemerintah daerah dalam memberikan kepuasan masyarakat. Semakin tinggi alokasi dana yang diberikan maka akan memberikan dampak positif bagi daerah. Hal ini dapat berbeda jika dana perimbangan terlalu diandalkan oleh pemerintah daerah atau dengan kata lain terjadi ketergantungan. Ketergantungan menunjukkan kinerja keuangan pemerintah daerah yang buruk karena tidak dapat mengeksplorasi potensi daerah.

H2: Dana Perimbangan Berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

E. Pengaruh SILPA terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

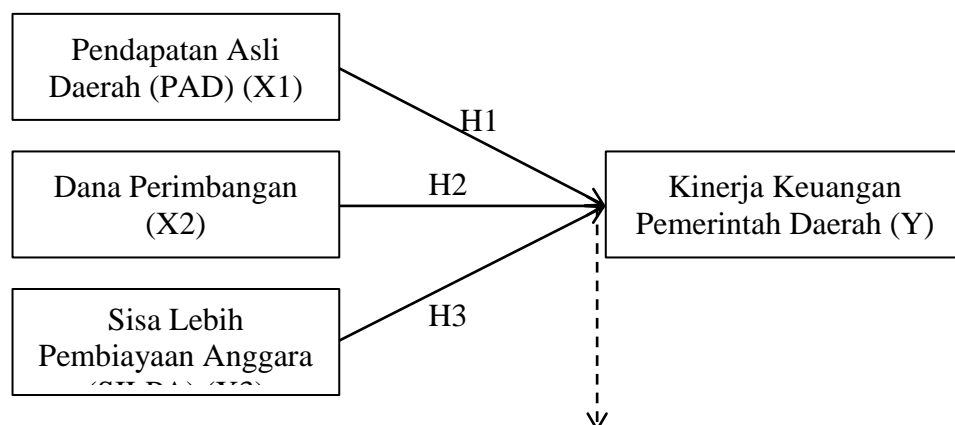
Hasil Penelitian Djuniar & Zuraida (2018), menunjukkan bahwa SILPA memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan besarnya SILPA pada tahun sebelumnya menyebabkan kinerja keuangan daerah menurun. Apabila dikaji dengan Teori *Stewardship*, SILPA pada tahun sebelumnya yang dialokasikan untuk periode selanjutnya berdampak baik terhadap masyarakat jika pengalokasiannya tepat. Tepat atau tidaknya pengalokasian ini merupakan wujud dari kinerja daerah yang dapat diukur melalui pengukuran kinerja keuangan daerah.

H3: SILPA Berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

F. Pengaruh PAD, Dana Perimbangan, dan SILPA terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

PAD, dana perimbangan, dan SILPA merupakan pendapatan yang dimiliki oleh daerah dan dikelola oleh pemerintah daerah itu sendiri. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ratnasari & Meirini (2022), PAD, dana perimbangan, dan SILPA memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

H4: PAD, Dana Perimbangan, dan SILPA Berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah



Analisis Regresi Data Panel

Gambar 1 Kerangka Pemikiran
Sumber: Data diolah penulis

III. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif dengan jenis data yang digunakan berupa data sekunder dari *website* resmi kota/kabupaten. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian terstruktur dengan penekanan pada fenomena objektif yang diukur dengan angka dan pengolahan statistik (Rukminingsih et al., 2020). Adapun data yang diperlukan untuk melakukan penelitian yaitu Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten/Kota se-Gerbangkertasusila selama 4 (empat) periode yaitu tahun 2018-2021. Penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* sehingga diperoleh 20 sampel penelitian meliputi 5 kota/kabupaten yaitu Kab. Gresik, Kota Mojokerto, Kota Surabaya, Kab. Sidoarjo, dan Kab. Lamongan.

Tabel 3 Rekonsiliasi Pemilihan Sampel

No	Kriteria	Jumlah
1	Kota/Kabupaten yang berada di wilayah metropolitan Provinsi Jawa Timur atau Gerbangkertasusila.	7
2	Kota/Kabupaten yang tidak menerbitkan Laporan Realisasi Anggaran dari tahun 2018-2021 melalui <i>website</i> resmi masing-masing daerah.	(2)
	Jumlah Kota/Kabupaten sampel penelitian	5
	Jumlah data penelitian (5 x 4 tahun)	20

Sumber: Data diolah penulis

Analisis data dilakukan menggunakan *Software Eviews 12* meliputi analisis statistik deskriptif, analisis regresi data panel, uji normalitas, uji asumsi klasik, uji koefisien determinasi, uji F, dan uji t.

IV. HASIL PENELITIAN

A. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk menjelaskan atau memberikan gambaran dari data sampel penelitian.

Tabel 4 Hasil Statistik Deskriptif

	X1	X2	X3	Y
Mean	1.65E+12	1.46E+12	4.98E+11	0.668180
Median	9.69E+11	1.58E+12	3.15E+11	0.491000
Maximum	5.38E+12	2.15E+12	1.20E+12	1.713800
Minimum	1.83E+11	5.31E+11	3.02E+10	0.175500
Std. Dev.	1.74E+12	5.20E+11	3.94E+11	0.513453
Skewness	1.186583	-0.609043	0.606275	1.137028
Kurtosis	2.909733	2.201699	1.828079	2.815864
Jarque-Bera	4.700057	1.767515	2.369729	4.337698
Probability	0.095366	0.413227	0.305788	0.114309
Sum	3.30E+13	2.92E+13	9.96E+12	13.36360
Sum Sq. Dev.	5.76E+25	5.14E+24	2.95E+24	5.009051
Observations	20	20	20	20

Sumber: Data diolah penulis dengan Eviews versi 12

Berdasarkan uji yang telah dilakukan, hasil analisis deskriptif sebagai berikut:

1. Daerah rata-rata memiliki PAD sebesar Rp1.650.000.000.000, nilai maksimum sebesar Rp5.381.920.253.809 yang dimiliki oleh Kota Surabaya pada tahun 2019, dan minimum sebesar Rp182.508.304.195 yang dimiliki oleh Kota Mojokerto pada tahun 2018.

2. Daerah rata-rata memiliki dana perimbangan sebesar Rp1.460.000.000.000, nilai maksimum sebesar 2.154.338.429.336 yang dimiliki oleh Kota Surabaya pada tahun 2021, dan minimum sebesar Rp531.120.863.558 yang dimiliki oleh Kota Mojokerto tahun 2018.
3. Daerah rata-rata memiliki SILPA sebesar Rp498.000.000.000, nilai maksimum sebesar Rp1.200.284.819.050 yang dimiliki oleh Kota Surabaya tahun 2018, dan minimum sebesar Rp30.172.246.506 yang dimiliki oleh Kabupaten Lamongan pada tahun 2019.
4. Daerah rata-rata memiliki kinerja keuangan sebesar 0,668180, nilai maksimum sebesar 1,713800 yang dimiliki oleh Kota Surabaya pada tahun 2019, dan minimum sebesar 0,175500 yang dimiliki oleh Kota Lamongan pada tahun 2018.

B. Analisis Regresi Data Panel

Data panel merupakan gabungan antara data *time series* dan data *cross section*. Terdapat tiga metode yang digunakan dalam analisis data panel meliputi *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM). Untuk mengetahui metode yang cocok untuk penelitian dilakukan uji chow, uji haussman, dan LM-Test.

1. Uji Chow

Uji ini dilakukan untuk memilih pendekatan terbaik antara model CEM dengan FEM.

Tabel 5 Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	3.878033	(4,12)	0.0302
Cross-section Chi-square	16.594409	4	0.0023

Sumber: Data diolah penulis dengan Eviews versi 12

Hasil dari uji chow menunjukkan nilai probabilitas *cross section* F sebesar 0,0302 < 0,05 sehingga model yang paling tepat dalam mengestimasi persamaan regresi adalah FEM.

2. Uji Haussman

Uji ini dilakukan untuk memilih pendekatan terbaik antara model REM dengan FEM.

Tabel 6 Hasil Uji Haussman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	6.071503	3	0.1082

Sumber: Data diolah penulis dengan Eviews versi 12

Hasil dari uji *haussman* menunjukkan nilai probabilitas *cross section* F sebesar 0,1082 > 0,05 sehingga H_0 diterima. Dengan demikian, model yang paling tepat dalam mengestimasi persamaan regresi adalah REM.

3. Uji LM-Test

Uji ini dilakukan untuk memilih pendekatan terbaik antara model CEM dengan REM. Adapun pengambilan keputusan sebagai berikut:

Tabel 7 Hasil Uji *LM-Test*

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects
 Null hypotheses: No effects
 Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided (all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	0.038116 (0.8452)	0.053084 (0.8178)	0.091200 (0.7627)

Sumber: Data diolah penulis dengan Eviews versi 12

Hasil dari uji LM menunjukkan nilai probabilitas *cross section Breusch-Pagan* sebesar 0,8452 > 0,05. Dengan demikian, model yang paling tepat dalam mengestimasi persamaan regresi adalah CEM.

Berdasarkan uji yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pendekatan model terbaik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *Common Effect Model (CEM)*. Adapun hasil uji regresi dengan metode CEM sebagai berikut:

Tabel 8 Hasil Uji Regresi dengan Metode CEM

Dependent Variable: Y
 Method: Panel Least Squares
 Date: 01/19/23 Time: 12:03
 Sample: 2018 2021
 Periods included: 4
 Cross-sections included: 5
 Total panel (balanced) observations: 20

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.295961	0.050972	5.806353	0.0000
X1	3.13E-13	1.37E-14	22.94870	0.0000
X2	-1.08E-13	4.49E-14	-2.413219	0.0282
X3	2.70E-14	4.85E-14	0.556276	0.5857
R-squared	0.987201	Mean dependent var		0.668180
Adjusted R-squared	0.984801	S.D. dependent var		0.513453
S.E. of regression	0.063301	Akaike info criterion		-2.504967
Sum squared resid	0.064113	Schwarz criterion		-2.305821
Log likelihood	29.04967	Hannan-Quinn criter.		-2.466092
F-statistic	411.3535	Durbin-Watson stat		2.666937
Prob(F-statistic)	0.000000			

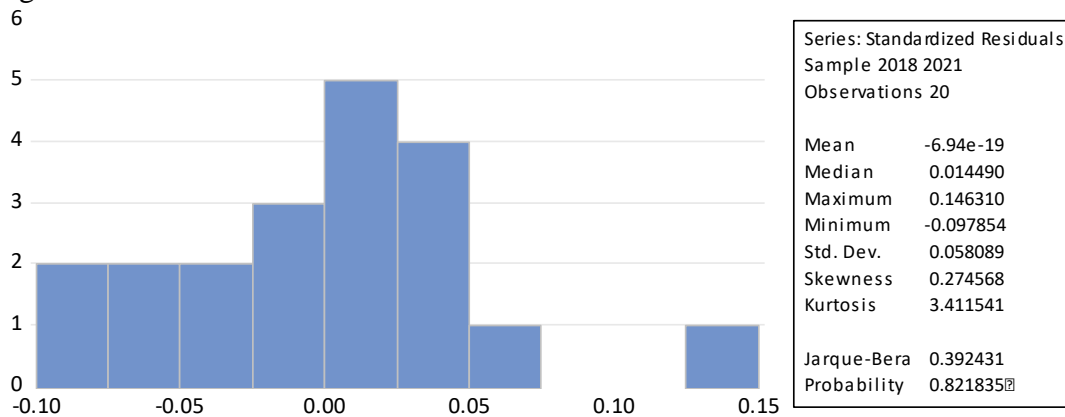
Sumber: Data diolah penulis dengan Eviews versi 12

Berdasarkan hasil regresi tersebut, maka persamaan regresi data panel yang digunakan sebagai berikut:

$$Y = 0,295961 + 3,13 \times 10^{13}X_{1it} - 1,08 \times 10^{13}X_{2it} + 2,70 \times 10^{14}X_{3it} + \epsilon_{it}$$

C. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan sebagai alat untuk mengetahui apakah data yang diolah telah memenuhi kriteria asumsi normalitas atau tidak.



Gambar 2 Hasil uji Normalitas

Hasil yang diperoleh dari uji normalitas dengan nilai Jarque-Bera (J-B) sebesar 0,392431 < 31,41043 (nilai *Jarque-Bera* < X^2 tabel) dan nilai probabilitas sebesar 0,821835 > 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi secara normal.

D. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi yang tinggi atau sempurna antar variabel independen (Ghozali, 2013:110).

Tabel 9 Hasil Uji Multikolinearitas

	X1	X2	X3
X1	1.000000	0.766146	0.619861
X2	0.766146	1.000000	0.600977
X3	0.619861	0.600977	1.000000

Sumber: Data diolah penulis dengan Eviews versi 12

Hasil yang diperoleh dari uji multikolinearitas menunjukkan bahwa nilai korelasi seluruh variabel independen kurang dari 0,80 sehingga tidak ada masalah multikolinearitas.

2. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan sebagai alat untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain (Prastiwi & Aji, 2020)

Tabel 10 Hasil Uji Heteroskedastisitas-Glejser

Dependent Variable: RESABS
 Method: Panel Least Squares
 Date: 01/19/23 Time: 12:27
 Sample: 2018 2021
 Periods included: 4
 Cross-sections included: 5
 Total panel (balanced) observations: 20

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.021071	0.014926	1.411754	0.1772
X1	5.05E-15	4.00E-15	1.263286	0.2246
X2	-1.55E-15	1.31E-14	-0.117975	0.9076
X3	-1.44E-14	1.42E-14	-1.015454	0.3250

Sumber: Data diolah penulis dengan Eviews versi 12

Hasil yang diperoleh dari uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji Glejser menunjukkan bahwa probabilitas seluruh variabel independen lebih dari tingkat signifikansi (0,05) sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas.

3. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan sebagai alat untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu (Ghozali, 2016)

Tabel 11 Hasil Uji Autokorelasi Durbin-Watson

R-squared	0.987201	Mean dependent var	0.668180
Adjusted R-squared	0.984801	S.D. dependent var	0.513453
S.E. of regression	0.063301	Akaike info criterion	-2.504967
Sum squared resid	0.064113	Schwarz criterion	-2.305821
Log likelihood	29.04967	Hannan-Quinn criter.	-2.466092
F-statistic	411.3535	Durbin-Watson stat	2.666937
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Data diolah penulis dengan Eviews versi 12

Berdasarkan dasar pengambilan keputusan yang telah ditentukan, nilai DW berada di antara $4 - d_U$ dan $4 - d_L$ yaitu $2,3237 < 2,666937 < 3,0024$. Berdasarkan hasil tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak autokorelasi dalam model regresi.

E. Uji Hipotesis

1. Uji Koefisien Determinasi

Hasil dari uji koefisien determinasi ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 12 Hasil Uji Koefisien Determinasi

R-squared	0.987201	Mean dependent var	0.668180
Adjusted R-squared	0.984801	S.D. dependent var	0.513453
S.E. of regression	0.063301	Akaike info criterion	-2.504967
Sum squared resid	0.064113	Schwarz criterion	-2.305821
Log likelihood	29.04967	Hannan-Quinn criter.	-2.466092
F-statistic	411.3535	Durbin-Watson stat	2.666937
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Data diolah penulis dengan Eviews versi 12

Hasil yang diperoleh dari uji koefisien determinasi dengan nilai Adjusted R² sebesar 0,984801 artinya 98% variabel kinerja keuangan dapat dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran. Sedangkan 2% dapat dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian.

2. Uji f

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen bersama-sama mempengaruhi variabel dependen.

Tabel 13 Hasil Uji f

R-squared	0.987201	Mean dependent var	0.668180
Adjusted R-squared	0.984801	S.D. dependent var	0.513453
S.E. of regression	0.063301	Akaike info criterion	-2.504967
Sum squared resid	0.064113	Schwarz criterion	-2.305821
Log likelihood	29.04967	Hannan-Quinn criter.	-2.466092
F-statistic	411.3535	Durbin-Watson stat	2.666937
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Data diolah penulis dengan Eviews versi 12

Hasil yang diperoleh dari uji F menunjukkan bahwa nilai F sebesar 441.2762 dan nilai probabilitas sebesar 0,000000 lebih kecil dari signifikansi 0,05 (0,000000 < 0,05). Berdasarkan hasil tersebut, maka pada tingkat signifikansi 0,05, PAD, Dana Perimbangan, dan SILPA secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

3. Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara individual (parsial).

Tabel 14 Hasil Uji t

Dependent Variable: Y
 Method: Panel Least Squares
 Date: 01/19/23 Time: 12:03
 Sample: 2018 2021
 Periods included: 4
 Cross-sections included: 5
 Total panel (balanced) observations: 20

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.295961	0.050972	5.806353	0.0000
X1	3.13E-13	1.37E-14	22.94870	0.0000
X2	-1.08E-13	4.49E-14	-2.413219	0.0282
X3	2.70E-14	4.85E-14	0.556276	0.5857

Sumber: Data diolah penulis dengan Eviews versi 12

Berdasarkan hasil uji t, maka dapat diambil keputusan sebagai berikut:

- Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai t hitung sebesar 22,94870 dan probabilitas $0,0000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.
- Variabel dana perimbangan memiliki nilai t hitung sebesar -2,413219 dan probabilitas $0,0282 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan.
- Variabel Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) memiliki nilai t hitung sebesar 0,556276 dan probabilitas $0,5857 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

F. Pembahasan

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah artinya hipotesis pertama diterima. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian Harjito et al. (2020) dan Maulina et al. (2021) yang membuktikan bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Apanila PAD meningkat maka kinerja keuangan daerah juga turut meningkat. karena pendapatan tersebut hasil jerih payah pemerintah yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah.

Berdasarkan Teori *Stewardship* yang menjelaskan bahwa pemerintah termotivasi untuk memenuhi kebutuhan publik dengan penuh tanggung jawab (Angelina et al., 2020). Peningkatan PAD merupakan bentuk upaya dari pemerintah dalam mengeksplorasi potensi yang dimiliki oleh daerah masing-masing. Hasil yang ditimbulkan dari peningkatan PAD ini dikembalikan untuk masyarakat daerah seperti pembangunan sarana dan prasarana daerah. Upaya yang dilakukan pemerintah ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah dalam memimpin wilayahnya sangat baik sehingga peningkatan PAD berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah artinya hipotesis kedua diterima. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian Digdowiseiso et al. (2022) yang membuktikan bahwa dana perimbangan memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Semakin tinggi dana perimbangan semakin menurun pula kinerja keuangan karena dana perimbangan tidak berasal dari kemampuan pemerintah dalam merealisasikan pendapatan daerah.

Teori *Stewardship* memandang bahwa pemerintah memiliki keinginan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Angelina et al., 2020). Berdasarkan teori tersebut, dana perimbangan digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun, dalam penelitian ini empat Kabupaten/Kota di wilayah Gerbangkertasusila memiliki dana perimbangan lebih besar daripada PAD yang terlihat dari Laporan Realisasi Anggaran masing-masing daerah. Hal ini menunjukkan bahwa daerah masih bergantung pada bantuan dana dari pemerintah pusat/daerah daripada mengoptimalkan kemampuan daerah untuk menghasilkan PAD sekaligus menunjukkan kinerja pemerintah daerah yang buruk. Oleh karena itu, semakin besar dana perimbangan akan menurunkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah artinya hipotesis ketiga ditolak. Hasil penelitian ini tidak selaras dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ratnasari & Meirini (2022). Rasio pengukuran kinerja keuangan yang digunakan pada penelitian tersebut yaitu efisiensi sedangkan dalam penelitian ini menggunakan rasio kemandirian.

Teori *Stewardship* memandang bahwa pemerintah termotivasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Angelina et al., 2020). Salah satu upaya pemerintah memenuhi kebutuhan masyarakat dengan pengalokasian SILPA tahun sebelumnya untuk pembiayaan tahun berikutnya. Dampak SILPA terhadap kinerja keuangan dipengaruhi efisien atau tidaknya pengalokasian oleh pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa SILPA tidak mempengaruhi kinerja keuangan dengan perhitungan rasio kemandirian tetapi mempengaruhi kinerja keuangan dengan perhitungan rasio efisiensi.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hipotesis keempat yang menyatakan bahwa PAD, dana perimbangan, dan SILPA bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah diterima. Hal ini dibuktikan dengan nilai probabilitas sebesar $0,000000 < 0,05$. Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah karena ketiganya merupakan sumber pembiayaan untuk kegiatan pemerintahan. PAD yang besar menunjukkan upaya pemerintah dalam mengeksplorasi potensi daerah cukup baik. Dana perimbangan yang besar berdampak baik terhadap masyarakat apabila dialokasikan dan dikelola

dengan optimal. Sama halnya dengan SILPA yang besar akan berdampak baik bergantung pada kemampuan pemerintah dalam mengelola keuangan daerah.

V. KESIMPULAN

Dari penelitian yang dilakukan, didapatkan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah dan dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah. Sedangkan SILPA tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah. Masukan yang dapat diberikan kepada peneliti selanjutnya yaitu menambah rasio pengukuran untuk kinerja keuangan pemerintah serta menambahkan variabel independen. Hal ini dilakukan dengan tujuan pemerintah daerah dapat mengetahui faktor yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan sehingga dapat dioptimalkan untuk peningkatan kinerja keuangan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Angelina, N., Efni, Y., & Rasuli, M. (2020). Pengaruh Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Kinerja Keuangan dengan Pengawasan sebagai Variabel Moderating di Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2014 - 2018. *Jurnal Bahtera Inovasi*, 4(1), 36–53. <https://ojs.umrah.ac.id/index.php/bahterainovasi/article/view/2757>
- Apridiyanti, A. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Jawa Barat 2013-2017. *JAE (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)*, 4(3), 32–41. <https://doi.org/10.29407/jae.v4i3.12822>
- Ayu, P. P. (2018). Analisis PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemda Se-Jawa Barat. *JAE (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)*, 3(1), 80–96. <https://doi.org/10.29407/jae.v3i1.12007>
- Digdowiseiso, K., Subiyanto, B., & Cahyanto, R. D. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Fair Value*, 4(6), 2572–2580. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i6.1150>
- Djuniar, L., & Zuraida, I. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Belanja Modal Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan. *BALANCE Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 3(2), 445. <https://doi.org/10.32502/jab.v3i2.1447>
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan program IBM SPSS 23 (Edisi 8)*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Harjito, Y., Nugraha, P. S., & Yulianto, Y. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota Di Indonesia. *JAE (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)*, 5(1), 19–28. <https://doi.org/10.29407/jae.v5i1.14061>
- Indonesia. (2004a). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.
- Indonesia. (2004b). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*.
- Kuncoro, M. (2014). *Otonomi Daerah Menuju Era Baru Pembangunan Daerah* (S. Saat & W. Hardani (eds.); 3rd ed.). Erlangga.
- Machmud, J., & Radjak, L. I. (2018). Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum

- Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo. *Journal of Accounting Science*, 2(1), 17–32. <https://doi.org/10.21070/jas.v2i1.1106>
- Maulina, A., Alkamal, M., & Fahira, N. S. (2021). Pengaruh Pendaparan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research.*, 5(2), 390–399. <https://doi.org/10.52362/jisamar.v5i2.373>
- Nugraheni, E., & Adi, P. H. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Meta-Analisis. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 20(1), 19–42. <https://doi.org/10.25105/mraai.v20i1.4398>
- Prastiwi, N. D., & Aji, A. W. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Keistimewaan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Kajian Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha*, 28(1), 89–105. <https://doi.org/10.32477/jkb.v28i1.45>
- Priyono, N., Fatimah, A., & Nurcahya, Y. (2020). Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat di Jawa Tengah. *Jurnal REP: Riset Ekonomi Pembangunan*, 5(2), 212–225. <https://doi.org/10.31002/rep.v5i2.2202>
- Ratnasari, D., & Meirini, D. (2022). PAD, Dana Perimbangan, Belanja Modal, SILPA dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Jawa Timur. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(5), 1189. <https://doi.org/10.24843/eja.2022.v32.i05.p06>
- Rukminingsih, Adnan, G., & Latief, A. M. (2020). *Metode Penelitian Pendidikan*. Erhaka Utama.
- Siregar, M. I. C. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Propinsi Papua. *Jurnal Aplikasi Manajemen, Ekonomi Dan Bisnis*, 5(1), 26–42. <https://doi.org/10.51263/jameb.v5i1.111>